

Representasi Kritik Politik terhadap Isu Esemka dan Mahkamah Konstitusi melalui Meme di Instagram

Dewi Ananda Putri*, Agus Machfud Fauzi

Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia

*dewi.23291@mhs.unesa.ac.id

Artikel

Submitted: 09-06-2025

Reviewed: 20-10-2025

Accepted: 03-12-2025

Published: 11-12-2025

DOI:

10.32509/wacana.v24i2.5479



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0.

Volume : 24
No. : 2
Bulan : Desember
Tahun : 2025
Halaman : 516-529

Abstract

Online pop culture has grown rapidly in the digital era and has changed the way people express their opinions, especially when discussing political issues. One of the most commonly used forms of expression is memes, as they are easy to understand, light, yet capable of delivering sharp criticism. This study examines the meanings contained in the meme "In the past, the father went to the capital riding ESEMKA, now the son goes to the capital riding EMKA," uploaded by the Instagram account @komikkitaig. Using Roland Barthes' semiotic analysis, this research explores meaning on three levels. At the denotative level, the meme presents a symbolic comparison between the father through the "ESEMKA" vehicle and the son through "EMKA" as a representation of the Constitutional Court. At the connotative level, the symbols "ESEMKA & EMKA" point to criticism of political projects that never materialized and the rise of dynastic politics. Meanwhile, at the mythical level, the meme shows how political power in Indonesia is often wrapped in symbolic development narratives. The findings suggest that memes function as visual satire capable of delivering political criticism without direct confrontation. Their simplicity and humor make the critique more accessible, as reflected in public responses such as reposts and online discussions that help reinforce the circulation of resistance discourses in digital spaces.

Keywords: Political Memes; Digital Democracy; Roland Barthes' Semiotics; Digital Pop Culture

Abstrak

Budaya pop online berkembang cepat di era digital dan ikut mengubah cara masyarakat menyampaikan pendapat, terutama ketika membicarakan isu politik. Salah satu bentuk ekspresi yang paling sering digunakan adalah meme, karena mudah dipahami, ringan, tetapi bisa membawa kritik yang cukup tajam. Penelitian ini membahas makna yang terkandung dalam meme "Dahulu, sang ayah ke Ibu Kota naik ESEMKA, kini sang anak ke Ibu Kota naik EMKA" yang diunggah akun Instagram @komikkitaig. Dengan memakai analisis semiotika Roland Barthes, penelitian melihat pemaknaan pada tiga level. Secara denotatif, meme memperlihatkan perbandingan simbolik antara ayah melalui kendaraan "ESEMKA" dan anak melalui "EMKA" sebagai representasi Mahkamah Konstitusi. Pada level konotasi, simbol "ESEMKA & EMKA" mengarah pada sindiran terhadap proyek politik yang tidak berjalan serta munculnya praktik politik dinasti. Sementara itu, pada level mitos, meme ini memperlihatkan bagaimana kekuasaan di Indonesia kerap dibungkus lewat citra pembangunan yang sifatnya lebih simbolik. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meme bekerja sebagai satir visual yang mampu menyampaikan kritik politik tanpa konfrontasi langsung. Kesederhanaan visual dan humor justru membuat kritik tersebut lebih mudah diterima, terbukti melalui respons warganet yang turut memperkuat penyebaran wacana perlawanan di ruang digital.

Kata Kunci: Meme Politik; Demokrasi Digital; Semiotika Roland Barthes; Budaya Pop Digital

PENDAHULUAN

Era digital ditandai dengan kemajuan teknologi yang memudahkan akses informasi secara cepat dan diterima secara luas (Harry Saptarianto et al., 2024). Istilah ini muncul pada abad ke-20, sebagian besar teknologinya divisualisasikan melalui media digital, yang memiliki karakteristik dapat dimanipulasi, bersifat jaringan, padat, interaktif dan tidak memihak. Secara sederhana media digital merupakan bentuk interaksi manusia dengan internet. Termasuk di dalamnya adalah web, blog, online social network, dan forum-forum online yang menggunakan komputer sebagai medianya (Ilham, 2017). Fenomena ini turut mempengaruhi Perubahan pola komunikasi pada era digital, pada ranah komunikasi massa yang merupakan sebuah proses penyampaian pesan atau informasi tertentu kepada publik yang dilakukan melalui media massa seperti televisi, radio, surat kabar, majalah maupun media digital seperti media sosial (Hasan et al., 2023).

Dalam konteks demokrasi politik, media sosial dimanfaatkan sebagai alat untuk menyampaikan pendapat, ide, dan kritik yang dianggap menyimpang dan bertentangan dengan norma sosial politik. Menurut Sanjaya (2013, dalam Luthfi, 2020) Pergeseran demokrasi politik terjadi pada saat orde baru berakhir, ketika masyarakat memiliki kebebasan dalam menyampaikan gagasan dan kritik yang ditunjukkan oleh pemerintah melalui media sosial. Oleh karena itu, digitalisasi yang terjadi pada era demokrasi politik saat ini mampu mendorong mobilisasi massa dengan cepat dan efisien. Sehingga, memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi secara mudah dan luas (Abdillah & Zulhazmi, 2021).

Pada saat yang sama, budaya digital turut mendorong perluasan bentuk budaya populer, yang tidak lagi hanya hadir dalam produk-produk konvensional, tetapi juga dalam citra visual berupa gambar, tulisan, dan video (Suhantoro & Sufyanto, 2024). Hal ini, sejalan dengan peningkatan pengguna media sosial di Indonesia. Berdasarkan data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII, 2023) mengumumkan jumlah pengguna internet Indonesia tahun 2024 mencapai 221 juta, atau setara 79,5% dari total populasi 278 juta jiwa penduduk Indonesia tahun 2023. Dari hasil survey ini menunjukkan bahwa tingkat penetrasi internet di Indonesia meningkat 1,4% dari tahun sebelumnya. Sehingga dalam diskusi politik Indonesia, dapat dikatakan bahwa media sosial menjadi medium yang penting dalam menyampaikan kritik, pendapat, serta idenya dalam hal masalah sosial politik. a

Salah satu bentuk ekspresi budaya populer yang semakin dominan adalah meme, karena mampu merangkum pesan, gagasan, kritik, serta humor dalam format yang singkat dan mudah dipahami. Meme dipilih karena humor satir yang dikandungnya dapat meningkatkan kualitas informasi sehingga lebih mudah diterima oleh masyarakat (Ni Nyoman Ayu Suciartini, 2020). Fenomena yang menarik perhatian adalah kemunculan meme sarkasme, yakni bentuk humor yang mengandung ironi pedas dan celaan tajam terhadap suatu kejadian atau ide (Pratiwi, 2022). Sementara itu, Humor pada dasarnya merupakan sebuah metode atau cara yang di pakai seseorang untuk menyampaikan ide dan pemikirannya. Menurut cally (Didiek Rahmanadji, 2009). Ben Jonson penulis, *Man Out of His Humor* melalui bukunya ia menunjukkan dua jenis humor, yaitu lewat Bahasa dan perilaku. Pertumbuhan ini kemudian terus tumbuh hingga abad ke-17 di Inggris. Secara umum, humor tidak menilai suatu hal benar atau pun salah, karena humor tidak menuntut pembuktian, yang paling utama adalah apakah hal tersebut lucu atau tidak. Dengan demikian, humor dalam meme telah menyebar dimasyarakat melalui berbagai bentuk dan fungsi. Diantaranya sebagai alat kritik sosial. (Luthfi, 2020; Susanti & Rahmawati, 2021).

Dalam ranah politik, meme menjadi sebuah visual yang mengandung humor, ironi, hingga kritik sosial. Seringkali hal ini, digunakan sebagai strategi komunikasi untuk menyampaikan kritik terhadap fenomena sosial atau politik secara satire agar mudah dipahami publik. Distribusi kritik dalam bentuk visual meme semakin efektif jika disebarakan melalui platform media sosial seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok hingga Youtube (Aritonang, 2023). Penyebaran ini dilakukan untuk memudahkan pengguna media sosial dalam menanggapi isu-isu politik yang beredar. Menariknya, penggunaan bahasa satire dalam meme ditujukan untuk mengungkapkannya sindiran atau kritik secara eksplisit. Melalui, diksi, kata, kalimat, atau jargon yang viral dan fenomenal di masyarakat.

Strategi ini menjadikan kualitas informasi yang diterima oleh masyarakat menjadi semakin akurat terhadap isu-isu politik yang berkembang (Literasi et al., 2024).

Instagram menjadi salah satu platform komunikasi digital yang relevan sebagai alat penyebaran meme karena dianggap efektif menjangkau audiens secara luas. Selain itu, fitur-fitur seperti memposting video reels dan foto, menjadikan Instagram sebagai wadah bagi penggunaannya untuk membuat, mengunggah, dan berinteraksi dengan berbagai konten (Suhantoro & Sufyanto, 2024). Menurut data dari (NapoleonCat, 2024) menunjukkan bahwa terdapat 90 juta pengguna Instagram di Indonesia, yang merupakan 31,9% dari seluruh populasi Indonesia. Dengan mayoritas berusia 25 hingga 34 tahun, tercatat sebagai pengguna terbesar dengan jumlah 36,2 juta orang. Sehingga memungkinkan penggunaannya melakukan interaksi dan diskusi melalui komentar, DM, dan berbagai unggahan foto atau reels, menjadikan kritik seperti meme politik sebagai topik diskusi yang luas.

Fokus pada Penelitian ini, yaitu mengkaji lebih dalam makna dibalik meme viral yang berisi teks: “Dahulu, Sang Ayah ke Ibu Kota Naik ESEMKA, Kini, Sang Anak ke Ibu Kota Naik EMKA”, pada unggahan Instagram @komikkitaig. Peneliti akan menggali simbol kritik sosial yang disampaikan melalui bentuk humor dan satire visual. Serta melihat partisipasi warganet, pada media Instagram dan Twitter dalam konteks, demokrasi politik. Dengan menggunakan pendekatan analisis semiotika Roland Barthes dengan dua tingkatan kategori yaitu, denotasi dan konotasi. Maka penelitian ini merumuskan masalah utama yaitu, bagaimana proses pemaknaan denotatif, konotatif dan mitos digunakan dalam menganalisis meme ESEMKA&EMKA, serta bagaimana unsur humor dan ironi meme dalam konteks budaya populer berperan sebagai bentuk kritik terhadap politik dinasti di Indonesia?

Pada penelitian yang telah dilakukan oleh (Ismoyo & Basaevha, 2025) yang berjudul “Analisis Komunikasi Politik Satire Anies Baswedan di Instagram: Kajian Semiotika Roland Barthes”. Telah membahas konten politik satire di Instagram menggunakan pendekatan semiotika Roland Barthes. Meskipun memiliki kesamaan dalam pendekatan teoritis. Akan tetapi, penelitian ini lebih banyak berfokus pada tokoh politik tertentu atau satire yang berbentuk foto personal. Sehingga, penelitian tersebut tidak membahas meme sebagai bentuk budaya populer yang bersifat partisipatif. Selain itu, belum ada studi yang secara spesifik menelaah meme ESEMKA&EMKA yang muncul dalam konteks polemik pemilu 2024. Khususnya meme yang menyinggung isu politik dinasti yang mengandung makna denotatif, konotatif dan mitos sebagai bentuk kritik.

Penelitian lain oleh (Baharudin & Fajarini, 2024), dengan judul “Meme Komunikasi Politik Atas Gibran Rakabuming Raka Di Media Sosial X (Studi pada akun X @nepo_baby)” Studi tersebut menekankan bahwa meme bukan sekadar hiburan, tetapi menjadi ruang penyampaian sarkasme dan kekecewaan publik menjelang Pemilu 2024. Namun, penelitian itu tidak membahas bagaimana visual sarkasme pada meme bekerja secara semiotik, dan tidak menyinggung meme yang menghubungkan isu Esemka&EMKA sebagai kritik terhadap dinasti politik dan Mahkamah Konstitusi pada akun Instagram @komikkitaig. Fokus pada penelitian ini menyoroti bagaimana sarkasme visual dimaknai dalam konteks budaya pop online serta kritik terhadap institusi politik seperti mahkamah konstitusi melalui pendekatan semiotika Roland Barthes. Selain itu, dalam penelitian yang berjudul “Hubungan Parasosial Komunitas Virtual Budaya Populer K-Pop dengan Calon Presiden Anies Baswedan” yang dikaji oleh (Adninta et al., 2024) lebih menyoroti hubungan parasosial dan perilaku pemilih, bukan pada konstruksi meme sebagai kritik politik. Fokus penelitiannya adalah interaksi fans K-pop dengan figur politik di platform X. Dengan demikian, penelitian tersebut tidak menyinggung meme politik, apalagi meme Esemka–EMKA, dan tidak melakukan pembacaan semiotika terhadap budaya pop digital.

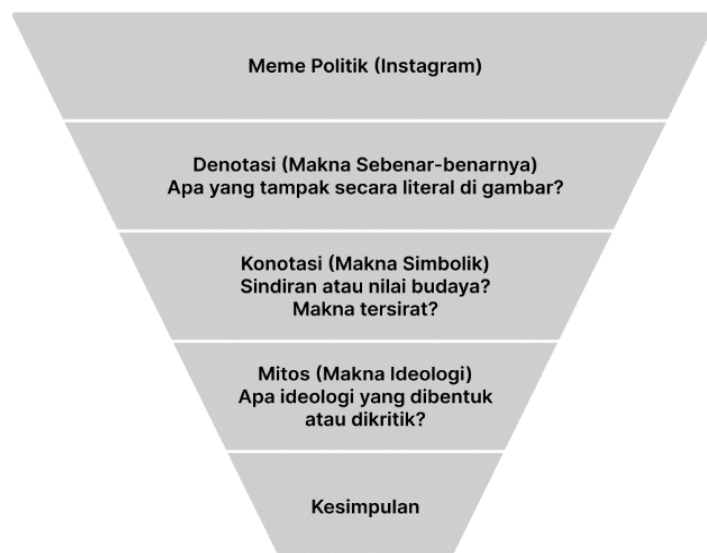
Berdasarkan celah penelitian tersebut, tujuan penelitian ini adalah menggali makna denotatif, konotatif dan mitos dalam bentuk sarkasme terkait meme “Esemka & Emka” yang di unggah pada akun @komikkitaig sebagai representasi kritik terhadap budaya politik dalam budaya pop online. Penelitian ini menggunakan analisis semiotika Roland Barthes dalam ranah komunikasi digital. Hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberi kontribusi secara praktis sebagai rujukan bagi pembuat kebijakan

dan aktivis digital, guna memahami bentuk-bentuk kritik dinasti politik untuk kemudian disirkulasikan dan dipahami oleh masyarakat dalam ruang digital.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan semiotika Roland Barthes. Metode ini relevan untuk mengidentifikasi dan menginterpretasi makna simbolik dan kritik yang tersembunyi dibalik meme politik pada unggahan akun Instagram @komikkitaig. Meme ini dipilih karena relevansinya dengan isu politik dinasti menjelang pemilu 2024. Pendekatan Roland Barthes dipilih berlandaskan, karyanya yang berjudul *Image, Music, Text* (1977). Lewat esai yang berjudul *Rhetoric of the Image*, Barthes membedah melalui tiga tahap makna, yaitu: (1) makna denotatif, sebagai gambaran makna yang sebenar-benarnya, (2) makna konotatif, berkaitan dengan emosional dan budaya, dan (3) makna mitos, sebagai konstruksi ideologis yang lebih dalam (Barthes, 1977).

Semiotika Barthes sendiri merupakan ilmu tentang tanda untuk mencari nilai, makna, dan simbol yang terdapat dalam bentuk gambar, meme, lukisan, foto, film, dan kata-kata dalam hal apapun yang mengandung sebuah makna. Sejalan dengan itu, untuk memperjelas alur analisis meme, penelitian ini menggunakan struktur piramida semiotika Barthes yang menempatkan denotasi dibagaian puncak, konotasi pada lapisan tengah, dan mitos di bagian dasar guna membedah makna-makna yang terkandung dalam meme. Model ini membantu menunjukkan langkah-langkah dalam membaca sebuah meme secara bertahap;



Gambar. 1 Struktur piramida makna semiotika Roland Barthes
(sumber: diadaptasi dari Barthes, 1977)

Gambar 1 merupakan piramida yang menjelaskan bahwa analisis semiotika Roland Barthes digunakan untuk menjelaskan atau menelusuri proses pembentukan makna. Piramida tersebut digunakan untuk menunjukkan alur atau tahapan yang dilakukan untuk menganalisis meme politik dari tiga lapisan utama yakni makna denotasi, konotasi, dan mitos. Melalui piramida ini, peneliti dapat menelusuri makna meme politik secara bertahap. Sehingga dengan cara ini, memungkinkan peneliti membaca bukan hanya berdasarkan isi visual, tetapi juga pesan simbolik dan politik yang berupaya dikomunikasikan melalui meme.

Target dari penelitian ini ialah dua meme yang berkaitan dengan isu politik dinasti pada waktu pemilu 2024, yaitu meme “ESEMKA&EMKA” serta “Pamanku Pahlawanku” yang di unggah pada akun Instagram @komikkitaig. Sedangkan unit observasinya mencakup konteks sosial yang menyertai keduanya, seperti komentar warganet di Instagram dan X, pemberitaan mengenai ESEMKA dan kontroversi MK terkait isu pencalonan Gibran sebagai calon walik presiden. Serta, kehadiran berbagai

sumber yang mendukung gambaran lebih lengkap, mengenai bagaimana masyarakat menanggapi dan memaknai meme politik tersebut.

Data dikumpulkan melalui dokumentasi digital dan studi pustaka. Dokumentasi dilakukan dengan cara mengunduh dan mengamati dua meme dari akun @komikkitaig untuk dikelompokkan secara manual ke dalam elemen visual, tekstual dan naratif. Seperti jenis tanda, warna, karakter, gestur, pilihan kata, dan bentuk satire dari meme. Selain itu, dokumentasi juga mencatat respon warganet yang muncul seperti likes, dan repost di Instagram maupun X/Twitter. Pengamatan ini membantu publik menanggapi isu yang muncul dalam meme. Sementara itu, studi pustaka dilakukan untuk menelusuri berbagai sumber yang relevan, mulai dari buku *Image-Music-Text* karya Roland Barthes sebagai dasar teori, jurnal mengenai meme politik dan budaya populer, hingga artikel berita tentang ESEMKA, MK, dan dinamika politik dinasti. Peneliti juga mencermati diskusi populer seperti video opini atau pembahasan publik, misalnya ulasan Raymond Chin tentang perjalanan bisnis dan politik ESEMKA untuk melengkapi konteks yang berkembang di ruang digital. Kombinasi dari kedua metode ini memberikan landasan yang cukup untuk membaca dan memahami makna dalam meme yang dianalisis.

Proses selanjutnya merupakan proses analisis tiga tahap Barthes. Pada tahap denotasi, peneliti mengidentifikasi apa yang tampak secara literal atau nyata dalam gambar. Pada tahap konotasi, peneliti menafsirkan makna simbolik, budaya, dan emosional yang muncul. Tahap mitos digunakan untuk mengurai ideologi yang bekerja di balik representasi tersebut, misalnya bagaimana meme membentuk kritik terhadap proyek ESEMKA, relasi kekuasaan keluarga, atau legitimasi Mahkamah Konstitusi. Ketiga tahap tersebut, diterapkan sesuai alur piramida Barthes yang menggambarkan proses makna dari tanda visual menuju kritik ideologis.

Validitas dilakukan melalui triangulasi yang membandingkan hasil analisis meme dengan respons publik, pemberitaan media, dan diskursus populer terkait politik dinasti. Pendekatan ini memastikan bahwa interpretasi tidak hanya berasal dari peneliti, tetapi juga selaras dengan wacana sosial yang berkembang. Dengan demikian, semiotika Roland Barthes memberikan kerangka yang konsisten untuk memahami bagaimana meme bekerja sebagai bentuk kritik politik dalam budaya digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konteks Sosial dan Latar Politik Meme

Jika dicermati, meme merupakan kata-kata atau teks disertai gambar dengan tema tertentu yang memuat humor yang disebarkan secara digital yang disebut Sebagai fenomena baru di media sosial. Istilah meme dicetuskan pertama kali oleh seorang ahli biologi Richard Dawkins pada tahun 1976 dalam bukunya *The Selfish Gene*. Secara etimologi, kata meme merupakan singkatan dari *mimeme* (imitasi) dan *gene* (gen) yang merupakan definisi dari istilah biologis konsep Dawkins yang kemudian merujuk pada fenomena umum budaya meme di internet yang digunakan untuk menjelaskan ide, ideologi, slogan, atau tren mode yang dapat menyebar secara luas dari satu orang ke orang lain. Dan sekarang ini, meme lebih sering dijadikan Sebagai frasa lucu yang viral di media sosial dan sering kali digunakan untuk menyampaikan ide atau opini terhadap topik tertentu.

Instagram merupakan aplikasi media sosial yang banyak diminati oleh penggunaannya untuk berbagai momen dalam bentuk foto atau video, selebihnya pengguna Instagram dapat berinteraksi dengan mudah terhadap pengguna lain secara virtual. Selain itu Instagram di dimanfaatkan oleh penggunaannya Sebagai akun untuk berbagai informasi, personal branding, Bisnis, dakwah hingga penyampaian pesan kritik sosial seperti yang dilakukan oleh akun Instagram @komikkitaig.

Pada bagian ini peneliti akan melakukan analisis semiotika Roland Barthes terhadap meme yang berisi kata "Dahulu, Sang Ayah Ke Ibu Kota Naik ESEMKA Kini, Sang Anak Ke Ibu Kota Naik EMKA". Yang diunggah pada akun Instagram @komikkitaig pada tanggal 24 Oktober 2023. Postingan meme sarkas ini dipicu oleh ketidakpuasan masyarakat terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), merupakan lembaga negara yang bertugas menjaga dan memutuskan peraturan serta menjaga agar undang-

undang tidak bertentangan dengan UUD 1995. Sederhananya dalam konteks ini, Mahkamah Konstitusi merupakan wasit tertinggi untuk memberikan keputusan hukum dan peraturan negara Indonesia.

Berdasarkan laporan (BBC News Indonesia, 2023) sidang yang di langsunjkan pada tanggal 16 Oktober 2023, menyatakan bahwa ketentuan usia minimal 40 tahun untuk menjabat sebagai capres dan cawapres tetap berlaku. Dengan pengecualian bagi mereka yang pernah atau sedang menjadi pejabat negara. Hal ini menuai perdebatan kontroversial pada kalangan akademisi maupun di media sosial. Pasalnya, keputusan ini merupakan hasil dari uji materi terhadap pasal 169 huruf q tahun 2017 tentang pemilu, dari pasal sebelumnya, bahwa syarat minimal usia 40 tahun tanpa pengecualian. Namun, ada putusan MK yang kemudian menambahkan tafsiran bahwa orang yang pernah atau sedang menjabat sebagai pejabat negara boleh mencalonkan diri sebagai capres atau cawapres. Keputusan MK telah memicu kritik tajam dari masyarakat Indonesia, pasalnya lembaga ini menunjukkan keberpihakannya terhadap politik dinasti.

Fenomena ini, menunjukkan bahwa keputusan MK tidak mampu meredakan gejolak kritik sosial di masyarakat, akan tetapi kritik ini semakin hidup dan direspon secara tajam oleh masyarakat di ruang diskusi publik. Tidak hanya itu, Presiden Jokowi pun ramai diperbincangkan telah melakukan praktik nepotisme. Karena dianggap, berupaya memuluskan langkah Gibran atau putranya dalam kontestasi Pilpres 2024.

Hal ini, membawa kembali isu-isu lama presiden Jokowi mengenai praktik politik yang dilakukan sebelumnya. seperti, proyek mobil Esemka yang menjadi sorotan karena dianggap sangat melekat dengan perjalanan citra politik presiden Jokowi. Pasalnya mobil Esemka yang diperkenalkan sebagai hasil karya anak bangsa pada tahun 2012 ini, mendapat dukungan penuh oleh Jokowi yang kala itu menjabat sebagai wali kota solo (Moladin, 2023). Akan tetapi hingga akhir masa jabatan presiden Jokowi, mobil ini justru hanya menjadi kontraversi karena belum sekalipun masyarakat menyaksikan mobil garapan anak bangsa ini terjun ke jalanan. Dugaan seperti, hasil *rebadge* dari produk Tiongkok, atau kegagalan uji emisi masih menimbulkan keraguan dan tanda tanya publik terhadap proyek Esemka. Alhasil proyek ini, dikaitkan dengan agenda politik kepentingan Jokowi. Selain itu, kritikus juga menilai kalau proyek ini hanya sebagai pencitraan saja sejak awal karir politik Jokowi. Secara umum proyek Esemka belum terealisasi hingga kini, sebagaimana ekspektasi publik di awal (CNN Indonesia, 2023).

Nama Esemka kembali melejit pada saat kampanye pemilu 2024, setelah pencalonan wali kota Solo Gibran Rakabuming Raka, sekaligus putra pertama presiden Jokowi Dodo sebagai cawapres pada tahun 2024. Perdebatan ini terjadi di berbagai forum dan media sosial, karena usia Gibran yang belum memenuhi syarat sebagai cawapres tahun 2024. Kritik ini semakin tajam setelah doktrin masyarakat terkait politik dinasti yang dilakukan oleh keluarga Jokowi. Kemudian disandingkan secara satire terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi pada sidang Oktober 2023, yang telah memicu gelombang kritik yang tajam terkait keberpihakan Lembaga hukum terhadap kepentingan politik dinasti (Maydani et al., 2024). Hal ini tentunya semakin menguatkan doktrin dan kritik sosial di masyarakat, pasalnya ketua Mahkamah Konstitusi yang menjabat pada kala itu, ialah (Anwar Usman) merupakan adik ipar dari presiden Jokowi Dodo. Sehingga ketua MK (Anwar Usman) ialah paman dari Gibran Rakabuming Raka.

Hubungan keluarga ini, menjadi semakin disorot usai Mahkamah Konstitusi dibawah kepemimpinan Anwar Usman menambahkan tafsiran pada pasal 169 huruf q tahun 2017 tentang pemilu. Hal ini, tentu menimbulkan polemik di masyarakat karena dinilai membukakan jalan untuk sang keponakan Gibran Rakabuming Raka untuk maju menjadi calon wakil presiden 2024.

Dalam situasi ini, politik keluarga Jokowi menjadi fokus yang berkaitan erat dengan nepotisme. Yaitu proses yang dilakukan dengan cara, menempatkan sanak famili dalam jabatan politik tanpa melihat kemampuan secara objektif. Akan tetapi, dilakukan melalui prosedural yang terlihat sah secara hukum, namun diragukan dari segi moral. (Fadiyah & Simorangkir, 2021). Fenomena ini akan dianalisis oleh penulis menggunakan semiotika Roland Barthes yang akan menggali (3) makna yaitu, denotasi merupakan makna sebenar-benarnya yang bersifat objektif dan umum diterima, konotasi memiliki

makna tambahan yang bersifat emosional atau subjektif, dan mitos untuk membongkar simbol dan kritik dibalik meme tersebut secara luas terhadap masyarakat dan budaya.

Meme “Dahulu Sang Ayah Ke Ibu Kota Naik Esemka, Kini Sang Anak ke Ibu Kota Naik Emka”



Gambar 2. "Dahulu, Sang Ayah ke Ibu Kota Naik ESEMKA. Kini, Sang Anak ke Ibu Kota Naik EMKA" (Sumber: Instagram @komikkitaig pada 24 Oktober 2023).

Denotasi

Gambar 2 merupakan meme yang diunggah pada akun Instagram @komikkitaig pada tahun 2023 lalu dan menjadi viral akibat isu politik yang berkembang menjelang pemilihan umum 2024. Meme tersebut kemudian menjadi sorotan publik dan menuai berbagai komentar masyarakat di media sosial karena mengandung pesan politik dan humor satire.

Secara denotasi meme tersebut menampilkan dua tokoh laki-laki yang secara visual menyerupai presiden Joko Widodo (sang ayah) dan Gibran Rakabuming Raka (sang anak). Pada bagian kiri tokoh pertama tampak mengendarai mobil dengan background berwarna abu-abu dan pakaian formal serta senyuman khas yang direpresentasikan sebagai presiden Jokowi, sementara pada bagian kanan terlihat tokoh kedua (Gibran Rakabuming) tersenyum bahagia dan sedang digendong oleh seseorang yang mengenakan jubah hitam khas Mahkamah Konstitusi (MK) dengan background warna biru langit. Kedua gambar meme tersebut memiliki latar belakang sama yaitu monas yang diyakini sebagai simbol ibu kota negara Indonesia.

Pada bagian atas gambar terdapat teks atau frasa “Dahulu Sang Ayah ke Ibu Kota Naik ESEMKA. Kini, Sang Anak ke Ibu Kota Naik EMKA.” Kalimat tersebut kemudian di beri caption “serupa tapi tak sama”. Berdasarkan segi tampilan meme ini berhasil memadukan elemen humor visual dan teks yang menonjolkan perbandingan antara dua publik figur dalam konteks ibu kota.

Konotasi

Point of view pada meme ini ialah kritik sarkasme pada teks atau Kalimat “Dahulu, Sang Ayah ke Ibu Kota Naik ESEMKA” yang kembali mengingatkan publik terhadap proyek mobil ESEMKA yang dijanjikan sebagai lambang kemandirian industri Indonesia. Kala itu proyek tersebut digarap oleh presiden Jokowi yang masih menjabat sebagai wali kota Surakarta (solo), pada tahun 2005 hingga 2012 dan proyek tersebut kembali di resmikan pada 6 September 2019 saat menjabat sebagai presiden. Namun, dianggap gagal produksi karena tidak dapat memenuhi janjinya untuk memproduksi mobil ESEMKA secara massal yang mengakibatkan perusahaan ESEMKA menghadapi gugatan wanprestasi dari konsumen yang merasa dirugikan. Sementara itu frasa “Kini, Sang Anak ke Ibu Kota Naik EMKA” menampilkan bahasa plesetan dari singkatan MK (Mahkamah Konstitusi), digunakan sebagai bentuk

sindiran sarkas terhadap keputusan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi karena mengesahkan aturan kontroversial yang memungkinkan Gibran Rakabuming untuk maju sebagai kandidat calon wakil presiden meskipun saat itu Gibran belum memenuhi batas usia yang telah ditetapkan sebagai syarat kandidat Capres dan Cawapres sebelumnya.

Dalam meme tersebut, menampilkan sosok Gibran yang digendong oleh seorang tokoh yang merepresentasikan petinggi MK. Adegan ini tidak hanya lucu, tetapi menyimpan makna mendalam' Gibran tidak naik melalui tangga prestasi, melainkan "digendong" oleh keputusan politik yang disahkan melalui MK. Pada meme ini, MK direpresentasikan sebagai Lembaga yang diasosiasikan sebagai keberpihakan, sehingga publik menilai ada praktik nepotisme pada pemilu 2024.

Latar belakang monas pada meme ini dilambangkan Sebagai simbol negara Indonesia yang direpresentasikan Sebagai pusat kebanggaan dan kekuasaan nasional. dalam ranah politik, kemunculan monas tidak lagi menjadi lambang kebesaran sebuah negara akan tetapi dilambangkan sebagai ambisi dan perebutan tahta, serta sejarah politik yang tampak berjalan melingkar dari sang ayah menuju sang anak. Dengan demikian, meme ini menggunakan bahasa visual dan verbal untuk menunjukkan ketimpangan antara narasi meritokrasi dan kenyataan politik yang sarat kepentingan keluarga.

Mitos

Barthes dalam mitos, membongkar makna realitas politik, seolah-olah menunjukan bahwa MK bukan lagi Lembaga yang menjaga institusinya secara objektif, melainkan MK tengah menjadi sebuah alat dalam permainan politik kekuasaan keluarga (dinasti politik). Barthes menyebut bahwa, mitos merupakan cara membongkar tanda dan makna yang bekerja dibawah kesadaran publik. Bagi Barthes, mitos tidak menciptakan kebohongan melainkan menormalkan sesuatu yang bersifat politik agar tampak netral dan wajar.

Dalam konteks ini, keputusan MK yang membuka jalan bagi Gibran untuk maju Sebagai calon wakil presiden dibungkus menjadi Sesuatu yang sah secara hukum, namun secara mitos keputusan tersebut justru dibaca masyarakat sebagai pelanggaran kekuasaan. Dalam bingkai ini sebetulnya, meme ini tidak hanya sarkas dan lucu akan tetapi meme ini terkesan pahit, sekaligus saksi bisu dari pergeseran makna kekuasaan. karena ia merepresentasikan kegelisahan masyarakat terhadap lucu dan rusaknya demokrasi politik prosedural oleh praktik-praktik yang dilakukan seakan-akan sah secara hukum. Melalui Budaya populer seperti meme, masyarakat dapat dengan mudah untuk berpartisipasi dalam demokrasi politik tanpa harus turun ke jalan. Humor dan sarkasme justru menjadi medium baru dalam menyampaikan kritik sosial dan dianggap Sebagai bentuk resistensi simbolik yang cerdas dan jenaka.

Meme "Pamanku Pahlawanku"



Gambar 3. Pamanku Pahlawanku
(Sumber: Instagram @komikkitaig pada 10 November 2023).

Denotasi

Gambar meme diatas, merupakan meme lain yang diunggah dalam satu akun Instagram yang sama pada 10 November 2023, bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan Nasional. Secara denotatif, meme "Pamanku Pahlawanku" Menampilkan sosok Gibran Rakabuming yang sedang digendong oleh pamannya, Anwar Usman yang merupakan ketua Mahkamah Konstitusi (MK). Latar merah-putih dengan tulisan "Selamat Hari Pahlawan, 10 November" memperkuat kesan hari peringatan nasional, karena melambangkan semangat dan keberanian yang dibungkus dalam simbol kepahlawanan.

Wajah Gibran yang tersenyum cerah, memberi kesan kebanggaan dan kemenangan simbolik, dengan posisi digendong oleh pamanya Anwar Usman sebagai ketua MK yang masih adik ipar presiden Jokowi kala itu. Kombinasi warna nasional dan ekspresi wajah menampilkan kontras visual yang kuat sebagai citra kepahlawanan dan dominasi politik.

Konotasi

Dalam gambar meme "Pamanku Pahlawanku" terdapat humor atau kritik sarkastik terhadap praktik nepotisme dalam tubuh kekuasaan. Warna merah yang identik dengan semangat justru menyiratkan simbol ambisi dan dominasi politik. Sementara warna putih yang melambangkan kesucian justru menggambarkan bagaimana legalitas hukum dapat dibungkus untuk kepentingan pribadi.

Ekspresi wajah Gibran yang tersenyum cerah menandakan simbol keberhasilan dalam konteks sosial politiknya, namun bukanlah senyum yang lahir dari kerja keras, melainkan representasi kepuasan atas keberhasilan yang diperoleh melalui hubungan keluarga, yang disebut sebagai politik dinasti. Posisi Gibran yang digendong oleh pamanya yang merupakan ketua MK (Anwar Usman), seolah merepresentasikan bagaimana kekuatan hukum justru seolah menjadi penopang kepentingan politik keluarga.

Meme ini menampilkan humor satire yang cerdas, yaitu menggunakan momentum hari pahlawan untuk menghadirkan humor satire, karena hari yang seharusnya diperingati sebagai hari integritas dan perjuangan, justru diplesetkan menjadi perayaan "pahlawan keluarga". Oleh karena itu, humor yang terkandung dalam meme ini bukanlah sekedar lucu, tetapi juga mengandung pesan sindiran terhadap kondisi politik yang dianggap tidak adil.

Mitos

Makna realistik yang terkandung dalam meme ini yaitu, mencerminkan bagaimana Budaya politik kekeluargaan perlahan malah membentuk pandangan umum yang tanpa sadar diterima oleh masyarakat. Mitos berfungsi menampilkan sesuatu yang sebenarnya merupakan hasil konstruksi sosial namun seolah-olah tampak alami dan benar. Dalam konteks tersebut, Gibran dan Anwar Usman digambarkan bukan hanya Sebagai figure keluarga, melainkan Sebagai simbol kekuasaan yang di selimuti nilai-nilai kepahlawanan. Ungkapan seperti, "pamanku pahlawanku" secara tidak langsung menyatakan bahwa keberhasilan politik dapat dicapai melalui dukungan penuh keluarga. Yang artinya, relasi kekerabatan memiliki peran dominan dalam sistem politik nasional.

Humor dan satire dalam meme ini terkesan halus namun tajam, namun dengan gaya yang ringan dan jenaka kritik terhadap politik dapat secara mudah tersampaikan tanpa menuding secara langsung. Karena, di balik citra kebanggaan dan kepahlawanan justru terdapat praktik nepotisme yang dianggap lumrah karena berlandung di balik nama kekeluargaan. Dengan demikian, meskipun lucu humor dalam meme ini justru kental oleh nuansa feodalisme dan nasionalisme semu.

Konteks sosial politik saat meme ini beredar turut memperkuat pembentukan makna mitologis tersebut. Unggahan ini muncul tidak lama setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengesahkan keputusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai batas usia calon presiden dan wakil presiden, keputusan yang membuka jalan bagi Gibran untuk maju sebagai cawapres. Situasi politik ini tengah memanas dan publik ramai membicarakan isu dinasti dan keberpihakan lembaga hukum negara, hingga potensi pelemahan sistem demokrasi. Manariknya, momen ini justru bedekatan dengan peringatan Hari

Pahlawan sehingga menciptakan kontras naratif antara pahlawan bangsa dan keluarga pahlawan politik. karena, pahlawan dalam konteks meme bukan lagi tokoh yang berjuang untuk negara, melainkan simbol kekuasaan yang diselimuti legitimasi moral dan sejarah perjuangan.

Meskipun keputusan MK secara prosedural sah secara hukum, namun secara mitos masyarakat membacanya sebagai pelanggaran kekuasaan. Meme kemudian hadir sebagai ruang simbolik untuk menggugat narasi resmi, yang membongkar bagaimana kepentingan keluarga dapat dinormalisasikan melalui Bahasa, humor dan simbol kepahlawanan. Dengan demikian, satire dalam meme ini berfungsi membongkar mitos yang menunjukkan adanya praktik nepotisme yang beroperasi halus dalam budaya politik Indonesia.

Pembahasan

Makna Politik

Temuan dari kajian ini menunjukkan bahwa dua meme politik yang dianalisis tidak hanya menghadirkan Gibran sebagai simbol politik dinasti, tetapi juga mengembangkan kritik yang lebih mendalam melalui visual “ESEMKA&EMKA”, serta “Pamanku Pahlawanku”. Kedua meme tersebut saling melengkapi dalam menjelaskan cara publik memahami praktik kekuasaan yang berhubungan erat dengan ikatan kekeluargaan, serta menunjukkan bahwa humor digital tidak hanya berperan sebagai hiburan, tetapi juga sebagai alat untuk mengkritik praktik kekuasaan, terutama isu politik dinasti dalam pemilu 2024.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (baharudin 2024) yang mengungkapkan bahwa meme yang berkaitan dengan Gibran Rakabuming berfungsi sebagai sarana untuk mengekspresikan kritik publik terhadap praktik nepotisme. Namun, penelitian tersebut hanya berfokus pada kritik bersifat pribadi dan tidak mengkaji bagaimana visual sarkasme berfungsi secara semiotik serta bagaimana isu “ESEMKA&EMKA” atau hubungan keluarga seperti “Pamanku Pahlawanku” berperan sebagai simbol politik.

Oleh karena itu, penelitian ini memperluas hasil tersebut dengan memusatkan perhatian pada Instagram dan mengeksplorasi makna tanda dan visual yang lebih terperinci melalui tahap denotasi, konotasi, dan mitos. Melalui semiotika Barthes, peneliti menunjukkan bahwa tanda-tanda tersebut tidak hanya berfungsi sebagai lelucon, tetapi menyimpan mitos politik mengenai legitimasi yang dianggap normal dalam budaya digital saat ini. Selain itu, hasil dokumentasi terhadap interaksi dan respon warganet di media sosial juga menunjukkan bahwa meme tersebut di terima sebagai bentuk kritik politik. Dengan cara ini, peneliti mendukung temuan sebelumnya, namun juga memperluas temuan tersebut melalui lapisan visual dari kedua meme yang belum dibahas pada studi sebelumnya.

Tabel 1. Perbandingan Makna Dua Meme Politik

Aspek Analisis	Meme 1: “Dahulu Sang Ayah ke Ibu Kota Naik ESEMKA. Kini Sang Anak ke Ibu Kota Naik EMKA”	Meme 2: “Pamanku Pahlawanku”
Denotasi	Menampilkan dua perbandingan generasi antara (Ayah dan Anak) serta dua kendaraan simbolik.	Menampilkan dua tokoh laki-laki dalam relasi keluarga dengan latar Hari Pahlawan dan balon teks “Pamanku Pahlawanku”
Konotasi	Kritik terhadap mobilisasi simbolik mobil ESEMKA dan kenaikan status politik melalui privilege keluarga.	Kritik terhadap keputusan MK, yang memberi pesan bahwa posisi mudah didapatkan bukan melalui kemampuan, tetapi karena memiliki hubungan keluarga.
Mitos	Meme ini mengungkap tentang kepantasan politik dinasti	Meme ini membangun mitos melalui kekuasaan politik, yang di peroleh melalui ikatan

	merupakan hal alamiah dan wajar terjadi pada politik di Indonesia.	kekeluargaan merupakan hal yang lumrah, wajar dan pantas disebut sebagai pahlawan.
Strategi Humor/Sarkasme	Meme ini menggunakan ironi, dengan membandingkan dua generasi melalui simbol kendaraan, menampilkan humor sarkastik yang menunjukkan perjalanan menuju kekuasaan di tentukan berdasarkan hubungan keluarga bukan demokrasi.	Meme ini memakai humor sarkas dengan memanfaatkan momentum hari pahlawan. Untuk menyoroti ironi kekuasaan melalui hubungan keluarga, dan seolah-olah anggota keluarga tersebut layak disebut sebagai pahlawan keluarga.
Pesan Utama	Politik Meme ini mengungkapkan bahwa kekuasaan politik dapat secara mudah diwariskan. Sehingga akses politik lebih mudah ditentukan melalui garis keturunan dibanding kemampuan individu.	Meme ini memakai ironi yang menyamakan pahlawan dengan paman dan membuat kontras antara hari pahlawan dan politik dinasti. Gaya kartun dan ekspresi digunakan untuk menyampaikan kritik secara lucu tapi tajam.

Sumber: Data Hasil Penelitian, 2025

Berdasarkan table 1, kedua meme memperlihatkan bagaimana tanda visual, warna, karakter, gestur, pilihan kata, dan bentuk satire dari meme dapat menghasilkan struktur makna yang lebih dalam dari sekedar humor, melalui pembacaan lapisan makna Denotasi, Konotasi, dan Mitos. Sehingga, menunjukkan mekanisme yang bergerak dalam spektrum satir yang sama yaitu meme, sekaligus humor yang bukan sekedar pemicu tawa melainkan sebuah strategi komunikasi politik yang memungkinkan kritik agar disampaikan tanpa konfrontasi langsung. Visual meme yang sederhana dan lucu justru menggoyahkan mitos besar. Hal ini, dibuktikan melalui berbagai respon publik dan unggahan ulang, hingga diskusi warganet yang tidak hanya menerima tetapi juga turut membangun wacana perlawanan melalui simbol digital.

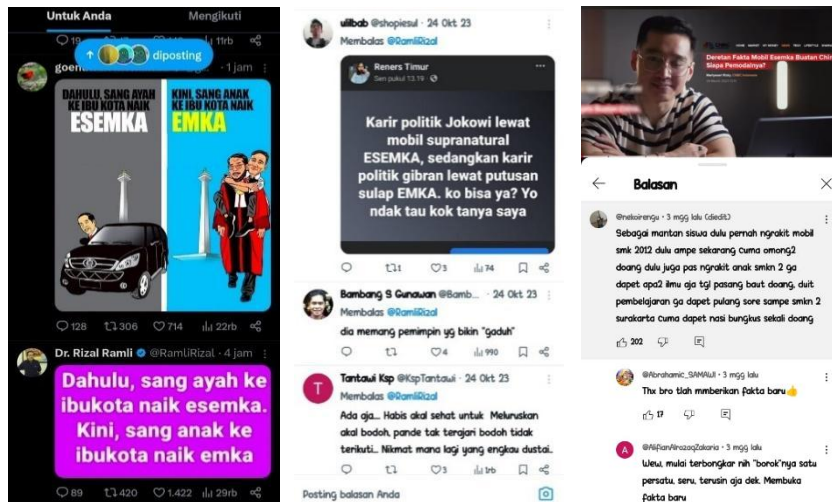
Secara keseluruhan, kedua meme ini berhasil memperlihatkan bahwa kritik politik saat ini tidak lagi hadir hanya melalui pidato, atau demonstrasi fisik saja, melainkan melalui humor digital yang sederhana namun menggandung pesan yang tajam. Sehingga, humor dan meme memiliki fungsi sebagai produksi makna tempat masyarakat mengekspresikan rasa kecewa, marah, maupun perlawanan terhadap politik yang dianggap tidak adil.

Budaya Digital dan Demokrasi Simbolik Warga Net

Berdasarkan gambar 4, dapat dijelaskan bahwa meme yang di unggah pada akun instagram @komikkitaig memicu tingginya partisipasi publik, Banyak warga net merespon meme tersebut dengan ekspresi kecewa, tidak memihak, sinisme, hingga lelucon sarkas. Partisipasi tersebut berhasil menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia pada saat ini tidak hanya sekedar menjadi penonton pasif akan tetapi mereka turut berperan dalam bentuk opini dan diskusi politik melalui bahasa visual yang mudah dipahami lintas kelas sosial. Fenomena ini juga menampilkan arena demokrasi partisipatif di mana masyarakat dapat menyampaikan aspirasi atau kritik secara kolektif seperti komentar, unggahan ulang (*repost*), dan penggunaan media sosial secara kreatif seperti unggahan kritik politik melewati meme dan humor satire.

Dengan demikian, partisipasi warganet menggambarkan medium baru bagi masyarakat untuk melakukan praktik demokrasi simbolik melalui ekspresi visual dan ironi politik. Sebagai contoh, yaitu dalam kanal youtube Raymond Chin, topik mengenai mobil Esemka kembali menarik perhatian publik dan menjadi bahan perdebatan usai ia mengunggah video dengan judul "Mobil ESEMKA: Pelajaran Bisnis dan Politik (Sejarah Jokowi, Analisa & Sejarah)" yang di unggah pada 28 April tahun 2025 dengan viewer sebanyak 536.669 dan 2,8 ribu komentar. Salah satu warganet dengan akun @nekoirengu

menuliskan pengalamannya, “Dulu saya ikut merakit mobil SMK tahun 2012, tapi sampai sekarang hanya jadi omongan saja. Waktu itu siswa SMKN 2 Surakarta tidak mendapatkan apa-apa, hanya disuruh pasang baut, tanpa ilmu dan tanpa bayaran, pulang sore pun cuma diberi nasi bungkus sekali”. Komentar ini mencerminkan kekecewaan masyarakat terhadap janji politik yang gagal direalisasikan. Serta komentar lain dari akun @dedentea4076 menuliskan kekaguman yang bermakna sarkas “ini mobil NCAP nya bintang tujuh...dari tahun 2014 sampai sekarang tercatat 0 kecelakaan, artinya safety banget. Luar biasa” yang menunjukkan bentuk sinisme publik terhadap ketidakjelasan proyek nasionalisme tersebut. Berdasarkan bentuk partisipasi diatas maka dapat dikatakan bahwa Hal ini sesuai dengan partisipasi pergeseran praktik demokrasi di era Budaya digital.



Gambar 4. Partisipasi Warga Net

(Sumber: (a) Twitter, diakses pada 23 Mei 2025; (b) YouTube (Raymond Chin, n.d.), diakses pada 23 Mei 2025).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan menggunakan teknik analisis semiotika Roland Barthes, peneliti mengupas makna dari elemen-elemen visual dan teks, baik secara harfiah (denotatif) maupun simbolik (konotatif) dan mitos. Dengan menyoroti makna yang tersembunyi di balik meme yang berbunyi “Dahulu, Sang Ayah ke Ibu Kota Naik ESEMKA, Kini, Sang Anak ke Ibu Kota Naik EMKA” dan “Pamanku Pahlawanku” yang di unggah oleh akun Instagram @komikkitaig. Penekanan utama terletak pada bagaimana simbol-simbol visual dalam meme digunakan sebagai medium kritik terhadap praktik politik dinasti di Indonesia. Temuan utama dari proses pemaknaan ini, menunjukkan bahwa meme berfungsi sebagai medium kritik terhadap praktik politik yang terjadi di Indonesia, yang memadukan humor dan ironi sebagai strategi utama untuk menyampaikan maksud dan kritik yang terselubung secara efektif dalam meme.

Ditemukan melalui analisis ini, terlihat bahwa humor dan ironi tidak hanya menjadi pelengkap gaya penyampaian, justru humor ini menyampaikan kritik secara tajam dan terselubung. Respons masyarakat yang terlihat melalui komentar, repost, dan diskusi di media sosial mengindikasikan bahwa meme telah menjadi bagian dari budaya populer yang aktif memengaruhi opini politik. Oleh karena itu, penelitian ini memperluas pemahaman mengenai peran meme sebagai alat komunikasi politik di era digital dan sebagai cerminan dari dinamika demokrasi yang sedang berlangsung. Sehingga dapat dikatakan secara keseluruhan, bahwa hasil dari penelitian ini menegaskan bahwa meme bukan hanya sekadar hiburan atau lelucon digital, melainkan juga alat komunikasi politik yang efektif dalam menyuarakan kritik, membentuk opini publik, dan mengartikulasikan keresahan melalui budaya populer di ruang digital.

Berdasarkan temuan pada penelitian ini, disarankan agar penelitian selanjutnya dapat memperluas kajian ke dalam bentuk-bentuk lain dari politik digital, seperti analisis citra politik di media sosial (Instagram, Tiktok, X), analisis wacana dan narasi krisis politik, podcast, atau konten kreator yang memiliki peran dalam membentuk opini publik. Selain itu, penting bagi masyarakat untuk terus kritis dalam memaknai pesan-pesan politik yang beredar di media sosial, agar humor dan satire tidak sekedar menjadi hiburan, melainkan menjadi ruang reflektif untuk menumbuhkan kesadaran politik yang lebih matang. Harapan kedepannya, agar pemerintah atau Lembaga media dapat melihat fenomena ini Sebagai potret nyata partisipasi publik dalam lanskap demokrasi digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Adninta, A., S., B. R., & Amalia, P. C. (2024). Hubungan parasosial komunitas virtual budaya populer K-pop dengan calon presiden Anies Baswedan. *Wacana: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, 23(2), 305–316. <https://doi.org/10.32509/wacana.v23i2.4148>
- APJII. (2023). *Jumlah pengguna internet Indonesia tembus 221 juta orang*. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. <https://apjii.or.id/berita/d/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang>
- Aritonang, A. I. (2023). Kritik sosial dalam karikatur: Analisis semiotika terkait kritik sosial dalam postingan Instagram Gejayan Memanggil. *Scriptura*, 12(2), 122–132. <https://doi.org/10.9744/scriptura.12.2.122-132>
- Baharudin, U., & Fajarini, S. D. (2024). Meme komunikasi politik atas Gibran Rakabuming Raka di media sosial X. *Madia*, 5(1), 173–188. <https://doi.org/10.36085/madia.v5i1.7934>
- Barthes, R. (1977). *Image, music, text* (S. Heath, Ed.). Fontana Press. <https://courses.lsa.umich.edu/jptw/wp-content/uploads/sites/23/2017/08/Barthes-ImageMusicText.pdf>
- BBC News Indonesia. (2023). *Mahkamah Konstitusi ubah batas usia capres-cawapres, Gibran bisa maju*. BBC News. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-67159382>
- Chin, R. (n.d.). *Mobil ESEMKA: Pelajaran bisnis dan politik (Sejarah Jokowi, analisa & sejarah)* [Video]. YouTube. <https://youtu.be/318DkaiyxEc>
- CNN Indonesia. (2023). *Catatan kontroversi mobil Esemka selama belasan tahun*. <https://www.cnnindonesia.com/otomotif/20230209100246-587-910843/catatan-kontroversi-mobil-esemka-selama-belasan-tahun>
- Fadiyah, D., & Simorangkir, J. (2021). Penggunaan media sosial Instagram dalam membangun citra positif Presiden Joko Widodo pada Pilpres 2019. *Journal of Political Issues*, 3(1), 13–27. <https://doi.org/10.33019/jpi.v3i1.48>
- Ismoyo, S. L., & Basaevha, M. (2025). Analisis komunikasi politik satire Anies Baswedan di Instagram: Kajian semiotika Roland Barthes. *Communications*, 7(1), 104–127. <https://doi.org/10.21009/communications.7.1.5>
- Luthfi, A. H. (2020). Analisis semiotika kritik sosial dalam balutan humor pada komik Faktap. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 17(1), 19–40. <https://doi.org/10.24002/jik.v17i1.1968>
- Maydani, R. D. di N. D., Husna, M. F., Winarti, S. L., Harahap, N., & Ardiansyah, A. (2024). Politik dinasti di negara demokrasi. *Jurnal Syntax Admiration*, 5(3), 950–955. <https://doi.org/10.46799/jsa.v5i3.1075>
- Moladin. (2023). *6 perjalanan mobil Esemka: Hilang dan tiba-tiba IIMS 2023*. <https://moladin.com/blog/perjalanan-mobil-esemka-dari-smk-hingga-tiongkok/>
- NapoleonCat. (2024). *Instagram users in Indonesia – April 2024*. <https://napoleoncat.com/stats/instagram-users-in-indonesia/2024/04/>
- Pratiwi, V. U. (2022). Sarkasme pada meme di media sosial Instagram. *Geram*, 10(1), 10–17. [https://doi.org/10.25299/geram.2022.vol10\(1\).9360](https://doi.org/10.25299/geram.2022.vol10(1).9360)
- Prihantoro, E., Widyaningsih, W., & Ramadhani, R. W. (2024). Pengaruh terpaan meme politik, kualitas informasi, dan literasi digital terhadap sikap pemilih pemula di Jabodetabek. *Interaksi: Jurnal Ilmu*

- Komunikasi*, 13(2), 351–371. <https://doi.org/10.14710/interaksi.13.2.351-371>
- Rahmanadji, D. (2009). Sejarah, teori, jenis, dan fungsi humor. *Jurnal Bahasa dan Seni*, 35(2), 213–221. <https://sastra.um.ac.id/wp-content/uploads/2009/10/Sejarah-Teori-Jenis-dan-Fungsi-Humor.pdf>
- Suciartini, N. N. A. (2020). Bahasa satire dalam meme media sosial. *Pustaka: Jurnal Ilmu-Ilmu Budaya*, 20(1), 1–9. <https://doi.org/10.24843/PJIB.2020.v20.i01.p01>
- Suhantoro, I., & Sufyanto, S. (2024). Meme sebagai katalisator politik di media sosial Indonesia. *Interaction Communication Studies Journal*, 1(2), 119–128. <https://doi.org/10.47134/interaction.v1i2.2887>
- Susanti, S., & Rahmawati, T. S. (2021). Humor dan Covid-19: Makna pesan dalam akun Instagram @t_faturohman. *Jurnal Lensa Mutiara Komunikasi*, 5(1), 1–9. <https://doi.org/10.51544/jlmk.v5i1.1785>